



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULISTYO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **214755**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.325.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/65 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/130 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/41 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 232 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 373 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
6. Tanah Seluas 238 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
7. Tanah Seluas 3480 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 205.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOBIL, ETIOS VALCO MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, VARIO SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI



	Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	47.500.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	215.069.201
F. HARTA LAINNYA		Rp.	82.468.676
Sub Total		Rp.	1.875.037.877
III. HUTANG		Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.875.037.877

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.